

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan di suatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam era Desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintahan dengan memberikan sebagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Mudrajat Kuncoro, 2004). Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut,

Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakan belanja modal untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran Belanja Modal adalah Meningkatnya aset tetap Daerah yang merupakan dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasan kepada pemerintahan daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali disuatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintahan daerah untuk melakukan pembangunan

daerah yang direlisasikan dalam pengadaan fasilitas, infrastruktur dan serana prasarana yang ditunjukkan untuk kepentingan publik.

Pemerintahan daerah perlu memberikan alokasi belanja yang besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan serana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah seharusnya merubah komposisi belanja, dimana selama anggaran belanja daerah digunakan untuk belanja operasi yang relatif kurang produktif dari pada belanja modal.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menamba aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, serana prasarana dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu (2005:6) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya investor yang melakukan investasi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun dan rata-rata realisasi Belanja Modal dan dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Ende selama tahun 2005-2019

sebagai tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data rata-rata realisasi Belanja Modal pada Kab. Ende**  
**Tahun Anggaran 2005-2019**

No	Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2005	234,744,605	0%
2	2006	301,391,197	22%
3	2007	335,994,604	10%
4	2008	457,511,000	27%
5	2009	487,456,278	6%
6	2010	423,153,590	15%
7	2011	589,002,460	28%
8	2012	699,417,417	16%
9	2013	696,389,460	0%
10	2014	893,929,356	22%
11	2015	1,077,160,544	17%
12	2016	1,366,378,591	21%
13	2017	1,267,037,377	8%
14	2018	1,153,384,980	10%
15	2019	1,276,097,068	10%

*Sumber: BPS Keuangan Kabupaten Ende, 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja modal mengalami fluktuasi (Naik-Turun) atau data dari tahun ke tahun selalu mengalami signifikan. Pada tahun 2005-2006 pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar 22%. Sedangkan Pada Tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 10% dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu, pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar 27%. Pada tahun 2009 mengalami penurunan realisasi belanja modal sebesar 6% sedangkan pada tahun 2010 pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2011 sebesar 28%. Pada tahun 2012-2013 realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 16%. Sedangkan pada tahun 2014, pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 22%, dan pada tahun 2015 realisasi belanja modal mengalami penurunan lagi

sebesar 17%. Pada tahun 2016 dengan realisasi belanja modal mengalami kenaikan lagi sebesar 21%. Sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 8%. Pada tahun 2018-2019 pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 10%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005-2019**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana gambaran umum tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005-2019?
2. Apakah Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005-2019?
3. Apakah secara persial Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ende Tahun 2005-2019.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ende Tahun 2005-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Secara Parsial dan Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ende Tahun 2005-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti yang terkait pada bidang kejian ini dapat menjadi referensi dan tambahan serta mendapatkan pengalaman secara empiris tentang kegiatan Kabupaten Ende dan mengalokasikan Anggaran Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Terhadap Belanja Modal.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dapat di jadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan sehingga pemerintah Daerah Kabupaten Ende dapat memberikan perhatian terhadap Kabupaten Ende dapat memberikan perhatian terhadap pengalokasian belanja Modal demi kepentingan masyarakat.